

**VOTE BUYING DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Peminatan Civil Society,
Pembangunan dan Demokratisasi**



Oleh:

Elys Puji Rahayu

165120507111020

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

VOTE BUYING DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI INDONESIA

SKRIPSI

Disusun Oleh :

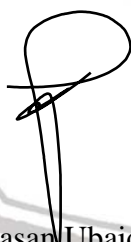
ELYS PUJI RAHAYU

165120507111020

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing :

Dosen Pembimbing I

Skripsi



Ahmad Hasan Ubaid, S.IP., M.IP.
NIK. 2016078204211001

Dosen Pembimbing II

Skripsi



Wawan Sobari, S.IP., MA., Ph.D.
NIP.197408012008011009

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

VOTE BUYING DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI INDONESIA

Disusun oleh :
Elys Puji Rahayu
165120507111020

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Sarjana Ilmu Politik pada
tanggal 5 Mei 2021

Tim Penguji

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,




Dr. rer. pol. M. Faishal A., SS., M.Si
NIP 198111222008121001

M. Fajar Shodiq Ramadlan, S.IP., M.IP.
NIP 198904232019031009

Pembimbing I,

Pembimbing II,




Ahmad Hasan Ubaid, S.IP., M.IP.
NIK. 2016078204211001

Wawan Sobari, S.IP., MA., Ph.D.
NIP.197408012008011009

Malang, 5 Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan PPHIFISIP UB



Aswin Ariyanti Aziz, S.IP., MdevSt.
NIP.197801202010121001

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elys Puji Rahayu

NIM : 165120507111020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul

***VOTE BUYING* DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
INDONESIA**

adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan termasuk karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari dibuktikan bahwasannya pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 5 Mei 2021

Pembuat pernyataan



Elys Puji Rahayu

NIM. 165120507111020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

VOTE BUYING DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI INDONESIA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan akademis setelah menempuh studi strata satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Skripsi ini disadari penulis jauh dari kata sempurna. Dalam proses penyusunannya, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*;
2. Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan, saran, motivasi, biaya, hingga doa yang tak terhingga selama proses kuliah;
3. Bapak Ahmad Hasan Ubaid, S.IP., M.IP selaku dosen pembimbing I,
Bapak Wawan Sobari, S.IP., MA., Ph.D. selaku dosen pembimbing II,
Bapak Dr.rer.pol. M. Faishal A., SS., M.Si selaku dosen penguji I, dan
Bapak M. Fajar Shodiq Ramadlan selaku dosen penguji II yang telah memberikan dukungan dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini;
4. Aswin Ariyanto Aziz, S.IP., M.DevSt selaku Ketua Jurusan PPHI
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Barwijaya;
5. Seluruh Dosen Ilmu Politik FISIP UB yang telah memberikan pendidikan perkuliahan;

6. Rekan-rekan Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya;

7. Bagian administrasi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang telah membantu memperlancar proses administrasi;

Akhir kata, penulis menyadari skripsi ini masih memerlukan perbaikan, baik secara materi maupun cara penulis menyajikannya tidak lain karena keterbatasan penulis, sehingga demi penyempurnaannya penulis mohon adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Malang, Mei 2021

Penulis



ABSTRAK

Elys Puji Rahayu, 2021, *Vote Buying Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Indonesia*. Tim Pembimbing: Ahmad Hasan Ubaid, S.IP., M.IP. dan Wawan Sobari, S.IP., MA., Ph.D.

Penelitian ini secara spesifik melihat apa saja *vote buying* yang ada di Indonesia khususnya pada saat pemilihan umum tahun 2019. Praktik *vote buying* merupakan sebuah hal yang melanggar hukum. Akan tetapi masih saja ditemukan adanya praktik-praktik *vote buying* di Indonesia saat menjelang pesta demokrasi (pemilihan umum) maupun saat berlangsungnya pesta demokrasi yang biasa dikenal dengan sebutan serangan fajar. Namun dalam banyak kasus, praktik *vote buying* ini jarang terungkap karena sifatnya yang merahasiakan dan terkadang hanya menjadi dugaan saja. Jenis Penelitian ini menggunakan analisis konten media dan pengumpulan informasi tambahan seperti dari buku, jurnal, maupun skripsi yang bisa memberikan informasi mengenai data yang penulis cari.

Kata Kunci: *Vote Buying*, Politik Uang, Pemilihan Umum

ABSTRACT

Elys Puji Rahayu, 2021, Vote Buying in the 2019 General Election in Indonesia. Advisory Team: Ahmad Hasan Ubaid, S.IP., M.IP and Wawan Sobari, S.IP., MA., Ph.D.

This study specifically looks at what vote buying is in Indonesia, especially during the 2019 general election. The practice of vote buying is a violation of the law. However, it is still found that there are vote buying practices in Indonesia before the democratic party (general election) and during the democratic party which is commonly known as the dawn attack. However, in many cases, the practice of vote buying is rarely revealed due to its secretive nature and sometimes it is just speculation. This type of research uses media content analysis and the collection of additional information such as from books, journals, and theses that can provide information about the data the author is looking for.

Keywords: Vote Buying, Money Politics, General Elections

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	2
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	3
LEMBAR PERNYATAAN.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
ABSTRAK.....	7
ABSTRACT.....	8
DAFTAR ISI.....	9
BAB I.....	11
PENDAHULUAN.....	11
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II.....	16
KERANGKA KONSEP.....	16
2.1 Kerangka Konsep.....	16
2.1.1 <i>Vote Buying</i> (Jual Beli Suara).....	16
2.2 Penelitian Terdahulu.....	18
2.3 Kerangka Berpikir.....	21
BAB III.....	22
METODOLOGI PENELITIAN.....	22
3.1 Jenis Dan Metode Penelitian.....	22
3.2 Fokus Penelitian.....	23
3.3 Lokasi Penelitian Dan Objek Penelitian.....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.5 Instrumen Penelitian.....	24
3.6 Sumber Data.....	25
3.7 Metode Analisis Data.....	25
3.8 Metode Keabsahan Data.....	25
BAB IV.....	27
GAMBARAN UMUM.....	27
4.1 Gambaran Umum Indonesia.....	27
4.1.1 Gambaran Pemilihan Umum 2019.....	27
4.1.2 Gambaran Pemerintahan Indonesia.....	30
4.1.3 Gambaran Sosia Politik Indonesia.....	31
BAB V.....	34
PEMBAHASAN.....	34
5.1 Praktik <i>Vote Buying</i> Yang Ada Di Indonesia.....	34

5.1.1 Analisis Model <i>Vote Buying</i> Yang Ada di Indonesia.....	35
5.2 <i>Vote Buying</i> pada Contoh Kasus di Pemilu 2019 di Indonesia.....	44
BAB VI.....	50
PENUTUP.....	50
6.1 Kesimpulan.....	50
6.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebanyakan di negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, dan juga tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Pada masa reformasi hingga sekarang telah terjadi pemilu sebanyak lima kali. Diantaranya terjadi pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan yang terakhir terjadi pada tahun 2019. Pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu instrumen penyaring bagi para politikus, dimana politikus ini nantinya akan mewakili suara rakyat di dalam suatu lembaga perwakilan. Orang-orang yang terpilih ini dirasa mempunyai suatu kelebihan untuk berbicara mewakili suara rakyat dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).¹

Adanya pemilihan umum seringkali terjadi pelanggaran di dalamnya. Salah satunya adalah politik uang atau yang biasa disebut dengan *money politics*. Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.²

Uang didalam pemilu akan sangat menentukan derajat integritas dari penyelenggaraan sebuah pemilu.³ Selain itu, uang dalam pemilu juga sangat

¹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 60-61.

² Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), hlm. 155.

³ Norris, P. (2014). *The Concept of Electoral Integrity: In Why Electoral Integrity Matter*. Cambridge University Press. Cambridge.

terkait dengan prinsip keadilan pemilu.⁴ Didalam masalah politik uang, kita akan dapat melihat berbagai hal penting, seperti "Siapa yang memberikan uang, berapa banyak uang yang diberikan, kepada siapa uang diberikan, dan untuk tujuan apa". Hal-hal seperti ini penting untuk diketahui karena politik uang merupakan sebuah masalah yang sangat serius yang seharusnya dapat dihilangkan ketika ada pesta demokrasi (pemilihan umum) di Indonesia.

Menurut data suvei yang dilakukan oleh Hasil sigi menunjukkan bahwa insiden politik uang terjadi secara masif dalam Pemilu 2019. Dilihat dari berbagai macam metode pengukuran, politik uang berkisar antara 19,4% hingga 33,1% tergantung pertanyaan dan jumlah skalanya. Pada Pemilu 2019, Daftar Pemilih Tetap (DPT) kita mencapai sekitar 192 juta orang. Kisaran antara 19% dan 33,1% berarti diperkirakan antara 37,3 juta hingga 63,5 juta pemilih terpapar praktik haram politik uang. Jika kita memakai estimasi yang paling tinggi, satu dari tiga orang di Indonesia menjadi sasaran empuk jual beli suara. Ini jelas bukan angka yang kecil, meskipun dari empat pengukuran yang dipakai baik pada survei paska-pemilu 2019 maupun 2014, tiga diantaranya menunjukkan tren politik uang yang sedikit menurun dibanding lima tahun sebelumnya.⁵

Selanjutnya sesuai data per 20 Mei 2019, dari total 7.598 kasus yang diproses terdapat 24 kasus pidana politik uang yang telah diputuskan inkrah oleh pengadilan.⁶

⁴ Ayman, A. & Ellis, A. (Eds.). (2010). Electoral Justice: The International IDEA Handbook. Stockholm: International IDEA.

⁵ Muhtadi, B. (2019). *Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru*. Jurnal *Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), 55-74, hlm. 62.

⁶ Admin KPU, 2019, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di ambil kembali dari https://www.kpu.go.id/index.php/post/read/RPnEDbmsgbiGX7_KWUrHhrpua9ACvgbcFjXOX_GJj4W3xAIG14QgWoY-k_AQ-YFQHSx3Sbbu_v8-M_gfh9Yr0sw~/oH8cBF2FW_sUAjMKxroMJdJGzImyLXcXC222iB3EidFwEPfrISlq7FgX2bfBf49WAI9O7ghYnRnvtxqSkob_Zw~. Pada hari Minggu, 26 Desember 2019 Pukul 22.10 WIB.

Politik uang pada pemilihan umum 2019 bisa meningkat dari pemilihan umum (pemilu) tahun 2014. Ada beberapa hal yang mendasari hal tersebut.

Pertama, sistem dan mekanik pada pemilihan umum tidak berubah dari tahun 2014. Kedua, orientasi kompetisi Pemilihan Legislatif tahun 2019 tetap berbasis pada popularitas dan personalitas calon legislatif. Ketiga, jika ingin terpilih kembali, maka setiap calon legislatif harus berusaha meningkatkan popularitasnya, meningkatkan aktivitas kampanye, dan secara personal membiayainya (Laporan ICW 2019).⁷

Politik uang adalah salah satu dari praktik vote buying. Pada awal reformasi bentuk politik uang digambarkan dengan suap di kalangan legislatif.

Sejak pemilihan dilakukan secara terbuka sampai dengan pemilihan tahun 2014 kemarin, politik uang terbagi menjadi dua menurut targetnya. Pertama, ditujukan bagi kelompok-kelompok atau lembaga terkait, seperti aparat pemerintah pemerintahan ataupun panitia penyelenggara pemilihan. Yang kedua, bentuk politik uang yang ditujukan langsung kepada pemilih yang biasa disebut dengan jual beli suara.⁸ INI yang tertuang didalam bukunya sukmajati. Sehingga dalam hal ini saya mengangkat judul vote buying pada pemilu 2019 di indonesia.

Vote buying atau jual beli suara merupakan sebuah tindakan yang ilegal serta tidak dibenarkan. Akan tetapi hal ini seperti sudah mnejadi suatu kebudayaan dalam masyarakat Indonesia ketika menjelang pesta demokrasi seperti pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Jual beli suara merupakan proses pembelian suara dengan memberikan sesuatu berupa uang atau

⁷ Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, Vol. 5, Nomor 1, hlm. 91.

⁸ Sukmajati, E. A. (2015), *Politik Uang Di Indonesia, Petronase dan Klientelisme pada Pemilu 2014*, Yogyakarta: PolGov, hlm. 30.

barang kepada calon pemilih. Hal ini bertujuan agar calon pemilih memilih kandidat tersebut.

Dalam hal ini, penulis ingin meneliti bagaimana *vote buying* yang digunakan di dalam pemilu 2019 yang mengakibatkan banyak sekali kasus *money politics* yang terjadi di Indonesia pada pemilihan umum 2019 kemarin serta akan membahas bagaimana keadaan atau perkembangan partai politik pada masa reformasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model yang bisa menjelaskan bekerjanya praktik *vote buying* dalam pemilihan umum tahun 2019 di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dituliskan sebelumnya maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana model yang bisa menjelaskan bekerjanya praktik *vote buying* dalam pemilihan umum tahun 2019 di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis setelah melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah karya yang bermanfaat untuk menambah ilmu serta dan wawasan ilmiah yang berhubungan dengan pemilihan umum dan *vote buying* serta menjadi informasi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya mahasiswa Ilmu Politik yang ingin melakukan penelitian yang memiliki kesamaan dalam penelitian ini.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi media informasi yang bermanfaat untuk kalangan siapapun yang membutuhkan bahan tambahan dalam tugas maupun penelitiannya. Penelitian ini juga sebagai bahan koreksi agar tidak terjadi kesalahan dimasa yang akan datang.

BAB II

KERANGKA KONSEP

2.1 Kerangka Konsep

2.1.1 *Vote Buying* (Jual Beli Suara)

Untuk kerangka konsep pertama yang dipakai oleh penulis yaitu teori mengenai *vote buying* atau jual beli suara. Dalam hal ini penulis membahas teori *vote buying* berdasarkan pengertian *vote buying* dan dimensi-dimensi jual beli suara (*vote buying*). Hal tersebut di uraikan sebagai berikut:

A. Pengertian Jual Beli Suara (*Vote Buying*)

Konsep jual beli suara merupakan bentuk dari politik uang yang digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik pelanggaran dalam pemilu. Pada awal reformasi bentuk politik uang digambarkan dengan suap di kalangan legislatif, hal tersebut dikarenakan saat pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh DPRD. Sejak pemilihan dilakukan secara terbuka sampai dengan pemilihan tahun 2014 kemarin, politik uang terbagi menjadi dua menurut targetnya. Pertama, ditujukan bagi kelompok-kelompok atau lembaga terkait, Yang kedua, bentuk politik uang yang ditujukan kepada pemilih yang biasa disebut dengan jual beli suara.⁹

Vote buying atau jual beli suara merupakan kegiatan memberikan uang tunai, barang atau jasa dari kandidat kepada pemilih secara sistematis pada saat kampanye atau menjelang pemilihan umum yang diiringi dengan harapan tersirat, si penerima akan membalasnya¹⁰ dengan memberi dukungan suaranya untuk si pemberi.

⁹ Sukmajati, E. A. (2015). *Politik Uang Di Indonesia, Petronase dan Klientelisme pada Pemilu 2014*, Yogyakarta: PolGov, hlm. 30.

¹⁰ Ibid..

B. Dimensi-Dimensi Jual Beli Suara (*Vote Buying*)

Menurut Ahli dalam penelitian terdapat dua dimensi dari variabel jual beli suara, yaitu dimensi pemahaman pemberian suara dan dimensi pengalaman jual beli suara.¹¹

1). Dimensi Pemahaman Jual Beli Suara (*Vote Buying*)

Pemahaman jual beli suara terkait dengan pengetahuan, atau penilaian pemilih terhadap praktik jual beli suara. Indikator dari pemahaman tersebut berdasarkan bentuk-bentuk dari jual beli suara yang lazim terjadi pada masa kampanye sebelum pemilihan umum, diantaranya menjanjikan pekerjaan, memberikan bahan bangunan, memberikan bahan makanan, memberikan pakaian, dan memberikan uang tunai.¹²

2). Dimensi Pengalaman Jual Beli Suara (*Vote Buying*)

Pengalaman jual beli suara terkait dengan pengalaman pemilih bersentuhan langsung dengan praktik jual beli suara dalam berbagai bentuk indikator dari pengalaman jual beli suara sama dengan pemahaman jual beli suara, yaitu menjanjikan kesejahteraan, memberikan bahan bangunan, memberikan bahan makanan, memberikan pakaian, dan memberikan uang tunai.¹³

3) Dimensi Pertukaran Jual beli Suara (*Vote Buying*)

Berdasarkan pertukaran Peter M. Terdapat imbalan dari pertukaran. Terdapat dua sifat dari imbalan tersebut, yaitu intrinsik berupa sikap yang ditunjukkan atau yang diberikan kepada orang lain, seperti baik, tegas, perhatian, ataupun dalam bentuk janji-janji memberikan pekerjaan. Adapun bentuk dari imbalan yang bersifat

¹¹ Ibid..

¹² Ibid..

¹³ Ibid..

ekstrinsik lebih kepada materi, seperti uang, bahan bangunan, pakaian, dan bahan makanan.

Pendekatan *rational choice* sama dengan penjelasan yang diberikan dalam model perilaku politik. Salah satu konsep *rational choice* yang digunakan untuk menjelaskan *voting behavior* pada pemilihan umum berupa money politics.

Beberapa indikator yang bisa dipakai oleh para pemilih untuk menerima politik uang adalah karena dianggap wajar, memenuhi kebutuhan pokok, dan menguntungkan secara pribadi.

Sejauh mana politik uang mempengaruhi perilaku politik tidak dapat diukur secara pasti. Perilaku politik masyarakat dapat berubah-ubah sesuai dengan preferensi yang melatarinya. Kejadian itu sangat memungkinkan karena setiap manusia dan masyarakat hidup dalam suatu ruang yang bergerak..¹⁴

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk referensi penulis dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu juga berguna untuk bahan perbandingan, pedoman maupun bahan koreksi penulis. Dengan adanya penelitian terdahulu, penulis bisa dengan mudah mengerjakan penelitian yang sedang dikerjakan. Juga dengan mengambil kekurangan serta kelebihan, akan lebih berhati-hati dalam mengerjakan penelitian. Penelitian terdahulu berperan sebagai bahan masukan dan saran dalam penelitian ini. Dibawah ini merupakan penelitian yang digunakan untuk penelitian terdahulu:

¹⁴ Hariyanto. (2015, April 16). *Implikasi Politik Uang Terhadap Perilaku Pemilih*. Diambil kembali dari PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN: <https://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/article/detail/89> , (diakses pada Kamis, 16 April 2020 Pukul 00.16 WIB).

Judul Penelitian	Tahun	Penulis
Politik Uang dan Perilaku Pemilih: Studi Terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan.	2017	Yusuf Humaidi
Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik	2018	Ratnia Solihah
Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru	2021	Burhanuddin Muhtadi

Sumber: Diolah oleh Penulis

Penelitian terdahulu pertama yang berjudul Politik Uang dan Perilaku Pemilih: Studi Terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Yusuf Humaidi (2017).

Penelitian Yusuf digunakan dalam penelitian ini sebagai referensi karena mempunyai persamaan yaitu memakai kerangka teori *vote buying* dan juga pendekatan perilaku pemilih (*rational choice*) atau pilihan rasional. Perbedaannya hanya terdapat pada metode penelitiannya. Karena pada penelitian in, Yusuf menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian terdahulu kedua yang berjudul Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik yang dilakukan oleh Ratnia Solihah

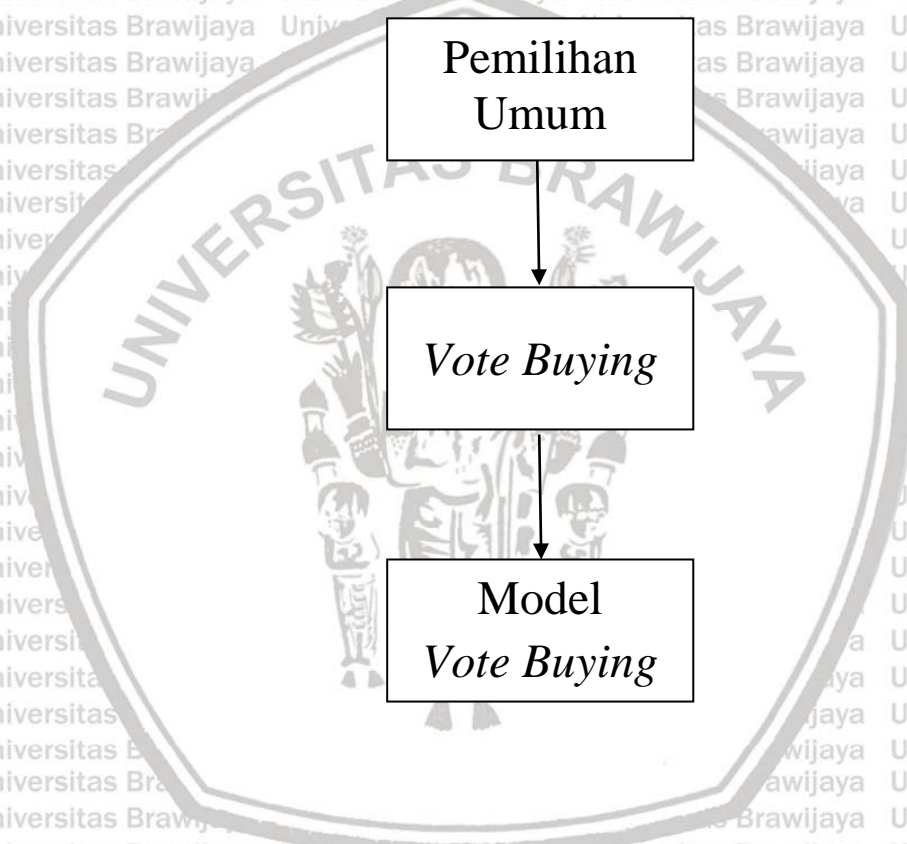
(2018). Penelitian Ratnia digunakan dalam penelitian ini sebagai referensi karena mempunyai persamaan yaitu sama-sama membahas tentang keadaan pemilu 2019.

Penelitian terdahulu ketiga ini berasal dari buku yang ditulis oleh Burhanuddin Muhtadi tentang The Prevalence of Vote Buying in Indonesia: Building an Index. Secara singkatnya, studi ini telah menjelaskan prevalensi pembelian suara di Indonesia, di mana sebagian sebagai akibat dari sistem pemilu yang dipersonalisasi dan persaingan antar partai yang ketat yang terjadi di sana para kandidat lebih mengandalkan jaringan pribadi daripada partainya, di mana ikatan partisan lemah, dan di mana loyalitas yang dipersonalisasi jauh lebih penting.



2.3 Kerangka Berpikir

Dalam melakukan penelitian *vote buying* yang dipakai dalam pemilihan umum tahun 2019, penulis mencoba membuat kerangka berpikir agar kerangka berpikir penelitian ini mudah dipahami dan juga menjadi acuan penelitian dan laporan hasil penelitian. Tujuan dibuatnya kerangka berpikir ini adalah untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, maka peneliti membuat kerangka berpikir sebagai berikut:



Dari kerangka berpikir di atas peneliti dapat menerka bahwa disetiap pemilihan umum pasti ada yang namanya *vote buying*. Maka dari itu di penelitian kali ini akan mencari bagaimana *vote buying* yang digunakan dalam pemilihan umum 2019 di Indonesia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Metode Penelitian

Berdasarkan judul dan tema penelitian yang penulis ambil, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Secara harfiah penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang penelitiannya tidak diperbolehkan menggunakan prosedur kuantifikasi, penghitungan statistik atau bentuk dan cara lainnya yang menghasilkan angka. Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menitik beratkan kepada kualitas, nilai atau pemaknaan terhadap suatu realitas dibalik fakta lapangan. Kualitas nilai ini dapat diungkapkan melalui bahasa, deskripsi atau kata-kata.¹⁵

Adapun jenis penelitian ini adalah menggunakan analisis konten media dan pengumpulan informasi tambahan seperti dari buku, jurnal, maupun skripsi yang bisa memberikan informasi mengenai data yang penulis cari. Penelitian lapangan tidak hanya bergantung secara eksklusif pada metode yang biasa digunakan seperti wawancara dan pengamatan langsung, tetapi disini penulis menggunakan laporan media lokal dan nasional tentang pembelian suara dan menganalisisnya secara kualitatif. Dibandingkan dengan sumber-sumber lain, media menyediakan banyak koleksi informasi tentang terjadinya politik uang, lokasi, waktu, dan targetnya. Untuk memastikan jangkauan yang lebih luas, penulis juga menggunakan "triangulasi berbagai sumber" dengan memanfaatkan situs-situs berita daring yang makin menjadi pilihan populer di Indonesia sebagai sumber data tentang *vote buying*. Selain itu, penulis mengumpulkan sejumlah

¹⁵ Imam Gunawan. (2014). *“Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek”*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 82.

informasi data dari buku-buku. Dalam penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi terhadap berita dari media online terkait praktik vote buying, dan motif di dalam pemilu 2019.

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.¹⁶

Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.¹⁷

Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.¹⁸

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi masalah yang akan diteliti, dimana fokus penelitian sejalan dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Dalam penelitian yang berjudul “vote buying dalam pemilihan umum tahun 2019”, peneliti memfokuskan bahasan terhadap bagaimana model yang menjelaskan bekerjanya praktik vote buying dalam pemilihan umum tahun 2019 di Indonesia.

¹⁶ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta : Salemba Empat, 2016), hlm.32.

¹⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodeologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), hlm.57.

¹⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm.33.

3.3 Lokasi Penelitian Dan Objek Penelitian

Karena metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Maka peneliti tidak secara khusus menunjuk tempat sebagai lokasi penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan kesulitan dan tidak bisa mendapatkan data yang dicari dengan memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁹

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dari berita yang ada di media online ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal berupa catatan atau lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan kajian *vote buying* dalam pemilihan umum 2019 di Indonesia.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang untuk bahan laporan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kumpulan tulisan atau artikel dan juga berita-berita yang ada di media sosial yang mencoba membahas topik yang sama dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini, seperti jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 308.

3.6 Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjelasannya:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber informasi.

Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.²⁰

2. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini data sekundernya adalah berupa kumpulan tulisan atau artikel yang mencoba membahas mengenai topik yang sama dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Mengumpulkan setiap bahan-bahan yang sudah diperoleh dari berbagai sumber. Lalu di jadikan satu dan disimpulkan.

3.8 Metode Keabsahan Data

Dalam penelitian, metode keabsahan data tidak jarang menekan kan pada uji validitas dan reliabilitas. Hal ini merupakan tingkatan atau ukuran ketepatan antara data yang ada pada tempat atau objek penelitian dengan data yang dihasilkan dan dilaporkan oleh peneliti. Disisi lain, reliabilitas berhubungan dengan tingkatan atau ukuran konsistensi dan stabilitas data.²¹

Keakuratan merupakan suatu hal yang dipakai dalam reliabilitas, yang artinya suatu bentuk penyesuaian antara hasil penelitian dengan kajian pustaka yang telah

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 363-364.

dirumuskan. Reliabilitas interrater juga digunakan ketika penelitian dilaksanakan secara berkelompok. Sedangkan reliabilitas ketekunan pengamatan dan pencatatan digunakan jika dilakukan sendiri seperti skripsi, tesis dan disertasi. Pengkajian yang teliti, akan berpengaruh pada ketidakberubahan pencarian makna.³⁹ Selain itu, bisa juga dibahas dengan orang lain yang mempunyai pemahaman terkait tema yang diteliti atau bisa menggunakan bahan-bahan yang bisa dijadikan sebuah referensi. Dalam hal ini, peneliti menggunakan bahan referensi untuk membantu dalam analisa suatu penelitian dan juga sebagai bahan pembandingan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Indonesia

Gambaran umum Indonesia terdiri dari gambaran tentang pemilu 2019, gambaran geografis Indonesia, gambaran demografis, gambaran pemerintahan Indonesia, dan gambaran sosial politik di Indonesia.

4.1.1 Gambaran Pemilihan Umum 2019

Isu-isu yang dianggap genting selalu dibicarakan banyak orang. Terutama isu-isu mengenai pelaksanaan pilihan legislatif dan pemilihan umum 2019 yang dilaksanakan pada bulan April 2019. Hal tersebut banyak diperbincangkan orang-orang karena dianggap menimbulkan suatu masalah di masyarakat. Salah satu isu yang diperbincangkan sehingga menjadi suatu polemik adalah adanya suatu keharusan mendapat dukungan 20 % kursi di DPR RI atau 25 % jumlah suara secara Nasional. Hal itu tentang pasal-pasal yang dalam segi aspek pencalonan satu paket pasangan calon presiden dan wakil presiden..²²

Selain itu, isu-isu yang di soroti dalam segi aspek adalah jika ingin mendapatkan kursi di tingkat DPR RI, maka harus mendapatkan setidaknya 4% suara secara nasional. Juga aspek yang disoroti ialah tentang sistem yang digunakan, yaitu sistem proporsional terbuka. Yang artinya, jika mendapatkan suara terbanyak, maka otomatis akan mendapatkan kursi pada daerah pilihannya. Selain itu penentuan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan yang didasarkan kepada

²² Agus, D. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal Moderat*, Vol. 5, Nomor 3, hlm. 213-214.

jumlah penduduk bukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau yang dinamakan dengan konsep *dapil Magnitude*. Dimana 3-10 bagi kursi di DPR RI dan 3-12 bagi kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam pengaturannya. Yang terakhir aspek yang di banyak permasalahan adalah tentang sistem penghitungan suara, dimana sistem ini hanya dilakukan satu tahap melalui Metode Konversi Suara *Saint Lague* Murni.²³

Pada akhirnya, suatu pemilihan umum akan tetap berjalan meskipun dengan berbagai polemik. Karena pemilihan umum ini merupakan suatu *event* untuk menciptakan sebuah perubahan menjadi lebih baik. Mendapatkan keadilan serta jembatan untuk membentuk pemerintahan yang lebih baik lagi. Perlu dijelaskan bahwa terbentuknya suatu pemerintahan ini melalui mekanisme sistem pemilihan umum yang berkeadilan. Hal ini merupakan sebuah upaya agar pemerintahan mempunyai legalitas dan diakui oleh semua pihak.²⁴

Kata demokrasi mempunyai suatu makna bahwa kedaulatan penuh itu berada di tangan rakyat. Sesudah zaman kemerdekaan, Indonesia mengalami pergantian sistem pemerintahan yang bisa disebut dengan zaman Demokrasi Liberal (Parlementer), Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila. Sistem itulah yang memandang bahwa rakyat mempunyai kedaulatan penuh.²⁵

Pada tahun itu, awalnya partai politik yang terdaftar sebanyak 27 partai politik. Akan tetapi hanya 16 partai politik saja yang menjadi peserta pemilu.

²³ Agus, D. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal Moderat*, Vol. 5, Nomor 3, hlm. 214.

²⁴ Ibid..

²⁵ Ibid..

Dikarenakan 11 partai politik yang lain tidak lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).²⁶

Ada beberapa tahap dalam kegiatan verifikasi didalam pemilihan umum.

Kegiatan verifikasi itu berupa tahap administrasi dan faktual. Tahap administrasi merupakan sebuah tahap pengecekan suatu kelengkapan dokumen. Sedangkan tahap faktual merupakan sebuah tahap verifikasi dengan cara mengunjungi setiap daerah-daerah untuk mengecek keberadaan para pengurus di setiap daerahnya.berdasarkan dokumen yang ada.²⁷

Pada pemilihan umum tahun 2019, awalnya partai politik yang terdaftar sebanyak 27 partai politik. Akan tetapi hanya 16 partai politik saja yang menjadi peserta pemilu. Dikarenakan 11 partai politik yang lain tidak lolos verifikasi.

Semua peserta pemilu yang telah lolos verifikasi ini ditetapkan berdasarkan keputusan KPU RI No. 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018.²⁸

Pemilihan umum merupakan salah satu wujud dari praktik demokrasi yang ada di Indonesia. Pesta demokrasi merupakan sebuah alat bagi masyarakat yang ikut terlibat dalam menentukan arah kepemimpinan negara ini.

Dikatakan demokratis apabila warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dapat memilih atau menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut merupakan suatu proses pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu sifat pemilu adalah rahasia yang berarti bahwa tidak akan diketahui oleh siapapun tentang pilihan kita ketika memberikan suara pilih kita. Pemilu yang jujur berarti siapapun yang terlibat dalam proses pemilu harus

²⁶ Agus, D. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal Moderat*, Vol. 5, Nomor 3, hlm. 215-216.

²⁷ Agus, D. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal Moderat*, Vol. 5, Nomor 3, hlm. 216.

²⁸ Ibid..

berada dikoridor aturan yang sudah ditetapkan. Sedangkan perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih merupakan suatu sifat pemilu yang adil.²⁹

Banyak harapan yang tertuju pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Dalam konteks pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden, pemilu serentak harus menghadirkan sistem pemilu yang berkeadilan bagi seluruh rakyat.

Surbakti, dkk (2011:8)

Salah satu penyebab keberhasilan pemilihan umum adalah keterlibatan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Bisa juga dilihat dari berapa banyak partisipasi masyarakat. Yang artinya semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilihan umum, maka dapat diartikan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum ini berhasil.³⁰

4.1.2 Gambaran Pemerintahan Indonesia

Indonesia pernah mengalami beberapa kali perubahan dalam sistem pemerintahannya. Yang pertama ketika negara Republik Indonesia diproklamasikan, dimana sistem ini menganut sistem presidensial. Kedua ketika ditetapkannya konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), sehingga secara tidak langsung Indonesia berubah menjadi negara serikat dan menerapkan sistem parlementer pada pemerintahannya. Ketiga, Indonesia tetap menggunakan sistem parlementer akan tetapi kembali berbentuk negara kesatuan. Keempat, sistem presidensial merupakan bentuk pemerintahan Indonesia setelah keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 dikarenakan Dekrit Presiden 1959 berbunyi bahwa

²⁹ Agus, D. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal Moderat*, Vol. 5, Nomor 3, hlm. 217-218.

³⁰ Agus, D. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal Moderat*, Vol. 5, Nomor 3, hlm. 221.

UUUDS 1950 tidak lagi berlaku dan kembali ke UUD 1945, serta pembubaran konstituante karena gagal membuat konstitusi yang baru.³¹

Pada akhirnya, saat ini presidensial merupakan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia sama seperti pada saat pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan. Meskipun terdapat perbedaan dikarenakan anggapan bahwa presiden mempunyai kuasa atau kewenangan yang sangat besar sehingga ada kemungkinan untuk dapat disalahgunakan. Berdasarkan sejarah diatas, pada tahun 1960-1965 sistem pemerintahan presidensial dipadukan dengan sistem multipartai terbatas. Selanjutnya pada tahun 1966-1998 adanya pengurangan partai sehingga hanya ada 3 partai saja yang ikut dalam setiap pemilihan umum. Pada zaman ini implementasi sistem pemerintahan presidensial digabung dengan sistem multipartai sangat terbatas.³²

4.1.3 Gambaran Sosia Politik Indonesia

Tabel Data Penduduk Indoensia berdasarkan Agama

Agama	Jumlah
Islam	207.176.162
Kristen	16.528.513
Katolik	6.907.873
Hindu	4.012.116

³¹ Ibid., hlm. 247-248.

³² Ibid., hlm. 248.

Budha	1.703.254
Khong Hu Chu	117.091
Lainnya	299.617
Tidak Terjawab	139.582
Tidak Ditanyakan	757.118
Jumlah	237.641.326

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 – Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Dan agama Kristen menempati urutan kedua terbanyak setelah agama Islam. Jumlah masyarakat yang beragama Islam sebanyak 207.176.162 orang. Masyarakat yang beragama Kristen sebanyak 16.528.513. Masyarakat yang beragama Katolik sebanyak 6.907.873. Masyarakat yang beragama Hindu sebanyak 4.012.116. Masyarakat yang beragama Budha sebanyak 1.703.254. Masyarakat yang beragama Khong Hu Chu sebanyak 117.091. Sebanyak 299.617 lainnya, 139.582 tidak menjawab, dan sebanyak 757.118 tidak ditanyakan. Sehingga total keseluruhan menjadi 237.641.326.

Pemilihan Umum (pemilu) serentak 2019 merupakan pemilu serentak pertama dalam perjalanan atau sejarah pemilihan umum di Indonesia. Keserentakan ini adalah amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 tahun 2013 yang mengabulkan sebagian permohonan gugatan yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Inti dari putusan MK ialah yang sesuai dengan amanat konstitusi pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pilpres) dilaksanakan secara bersamaan. Oleh

karena itu mulai pemilu 2019, pelaksanaan Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara serentak.³³

Pertisipasi pemilih, efisiensi waktu serta dana merupakan sebuah hal yang menjadi suatu pertimbangan dalam pelaksanaan pemilu serentak serta upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Sebagaimana dalam putusan MK, pemilu serentak diharapkan membawa dampak positif dalam mengatasi kekurangan partisipasi pemilih dalam Pilpres dan Pileg. Hal itu bisa dikurangi dengan pemilu serentak dikarenakan pemilih bisa menggunakan hak pilihnya.³⁴

Jika dibandingkan dengan pemilihan umum sebelumnya, maka ada selisih tingkat partisipasi sebesar 1,09 persen ditahun 2009. Tahun 2014 mempunyai selisih sebesar 5,53 persen atau selisihnya lebih tinggi dibandingkan tahun 2009.³⁵ Di tahun 2019 pemilu serentak diterapkan, hasilnya melebihi target yang ditetapkan oleh target Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu sebesar 77,5 persen. Partisipasi pemilih mencapai angka 81 persen.³⁶ Berdasarkan persentase 81 persen tersebut, terdapat 158.012.499 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari keseluruhan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 199.987.870 orang. Jumlah partisipasi pemilu 2019 juga menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan dua kali pemilu sebelumnya. Pemilu 2014 untuk Pilpres menorehkan angka partisipasi 69,58 persen, Pileg 75,11 persen. Sedangkan pemilu 2009 angka partisipasi untuk Pilpres sebesar 72,09 persen, dan Pileg sebesar 71 persen.³⁷

³³ M. Faishal Aminuddin, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 "Perihal Pemungutan dan Perhitungan Suara"* (Jakarta: Bawaslu, 2019), hlm.91.

³⁴ Ibid., hlm 91-92

³⁵ Diolah data dari KPU, Dilihat dalam M. Faishal Aminuddin, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 "Perihal Pemungutan dan Perhitungan Suara"*, (Jakarta, Bawaslu, 2019), hlm.92.

³⁶ Kompas.com, "Pemilu 2019, KPU Optimis Target 77,5 Persen Partisipasi Pemilih" <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/12453331/pemilu-2019-kpu-optimis-target-775-persen-partisipasi-pemilih-tercapai> diakses pada 12 Oktober 2019, Dilihat dalam, Ibid., hlm 92

³⁷ Diolah data dari KPU, Dilihat dalam Ibid., hlm 92.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Praktik *Vote Buying* Yang Ada Di Indonesia

Praktik *vote buying* masih sering terjadi di Indonesia ketika menjelang pesta demokrasi seperti pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum (presiden dan legislatif). Seperti yang kita ketahui, *vote buying* sudah tidak asing lagi di masyarakat dan bahkan dianggap sebagai hal yang wajar. Padahal, ada hukuman tersendiri bagi pelaku *vote buying* yang menjalankan aksinya ketika menjelang maupun berlangsungnya sebuah pesta demokrasi di Indonesia.

Praktik-praktik *vote buying* terjadi dimana-mana. Tidak hanya di pedesaan, akan tetapi juga bisa terjadi di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Beberapa modus *vote buying* pun kerap terjadi, seperti halnya yang ditemukan oleh Firman Shantyabudi selaku Deputy Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menemukan satu calon anggota legislatif yang diduga melakukan politik uang dengan cara membagikan asuransi kecelakaan atau kesehatan kepada masyarakat.³⁸

³⁸ Voaindonesia.com, “PPATK Temukan Modus Baru Politik Uang dalam Pemilu 2019”, <https://www.voaindonesia.com/a/ppatk-temukan-modus-baru-politik-uang-dalam-pemilu-2019/4863564.html> diakses pada 20 September 2020.

5.1.1 Analisis Model *Vote Buying* Yang Ada di Indonesia

Secara kuantitas, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Namun secara administrasi elektoral, Indonesia lebih kompleks ketimbang India dan Amerika Serikat. Di India dan Amerika, pemilu tidak diselenggarakan dalam waktu bersamaan. Di India, pemilu dilaksanakan berminggu-minggu, sementara di Amerika mengenal istilah pemilu sela yang dilakukan di luar jadwal pemilihan presiden. Indonesia menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak dalam satu hari pada tanggal 17 April 2019. Total penyelenggara pemilu mencapai lebih dari 7,3 juta orang dengan total daftar pemilih tetap mencapai 192 juta. Meskipun masih banyak kekurangan, rekam jejak penyelenggaraan pemilu secara umum baik. Hasil *Exit Poll* Indikator Politik Indonesia menunjukkan sebanyak 93,8% responden yang diwawancarai setelah mencoblos pada April 2019 mengatakan bahwa pemilu telah dilaksanakan secara demokratis.³⁹

Namun itu bukan berarti pemilu kita jauh dari masalah. Rendahnya integritas pemilu masih menjadi agenda yang belum terselesaikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendefinisikan integritas sebagai "kesatuan dan keselarasan akan pikiran, sikap dan perilaku terhadap nilai-nilai tertentu dalam tingkat individu yang dilakukan dengan penuh komitmen yang konsisten."⁴⁰

Pemilu yang berintegritas terjadi pada dua level sekaligus: pemilih dan politisi. Jika pemilih berintegritas, maka ia akan memilih calon presiden dan wakil presiden maupun DPD / DPR / DPRD 1 / DPRD II yang tidak melakukan praktik

³⁹ Muhtadi, B. (2019). *Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru*. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 55-74, hlm. 56.

⁴⁰ Laporan Hasil Penelitian "Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013," Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, h.V. Dilihat dalam Muhtadi, B. (2019). *Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru*. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (1), 55-74, hlm. 56.

politik uang, penggelapan pajak, korupsi, tindakan asusila / etika, dan tindakan SARA. Demikian juga politisi yang berintegritas tentu takkan menggunakan cara-cara haram di atas dalam meraih suara dalam pemilu.⁴¹

Sejak gelombang demokratisasi ketiga dan keempat melanda dunia pada 1970-an⁴², pemilihan umum (pemilu) telah menjadi norma global: Namun, karena banyak rezim demokrasi baru sekadar memenuhi standar minimal demokrasi elektoral, optimisme awal tentang kebangkitan demokrasi dunia terpaksa harus didiskon ulang. Banyak pihak yang sebelumnya sangat antusias atas perkembangan demokrasi berubah menjadi skeptis, karena demokrasi elektoral tidak secara otomatis mengandaikan demokrasi liberal. Demokrasi elektoral masin banyak menyisakan problematik kebebasan sipil dan lemahnya penegakan hukum⁴³.

Hal yang tidak kalah penting, meskipun hampir semua negara di dunia pada saat ini menyelenggarakan pemilu multipartai, tidak seluruh rezim mampu meningkatkan kualitas pemilu, terutama dalam menjamin prinsip pemilu yang bebas dan adil.⁴⁴ Jika ajang pemilu multipartai diwarnai berbagai kecurangan dan malapraktik elektoral, kualitas demokrasi menjadi bermasalah. Praktik jual beli suara-pertukaran keuntungan materiel untuk mendapatkan, atau setidaknya mengharapkan, suara-merupakan salah satu bentuk manipulasi elektoral yang lazim dijumpai di negara-negara demokrasi baru.⁴⁵

⁴¹ Ibid.,

⁴² Huntington, S. (1991). *The Third Wave: Democratisation in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press. Dilihat dalam Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), hlm. 1

⁴³ Diamond, 2002; Rose dan Shin, 2001. Dilihat dalam ibid.,

⁴⁴ Van Ham dan Lindberg, 2015. Dilihat dalam ibid., hlm.2.

⁴⁵ Jensen, PS dan MK Justesen. 2014. *"Poverty and Vote Buying: Survey based Evidence from Africa"*. *Electoral Studies*, 33:220-232. Dilihat dalam ibid.,

Tak lama setelah rezim Orde Baru Soeharto yang otoriter berakhir pada Mei 1998, sistem kepartaian Indonesia memasuki era baru. Sebelum keran reformasi dibuka, partai politik dibatasi hanya ada tiga, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golkar. Setelah reformasi, partai baru bermunculan bagaikan cendawan di musim hujan. Akibatnya, muncul sistem multipartai yang sangat kompetitif yang berbarengan dengan diperkenalkannya pemilu multilevel dari pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Ironisnya, hampir semua partai politik adalah pendatang baru tanpa memiliki kredibilitas politik yang memadai.⁴⁶

Sikap partisan memang merupakan inti perdebatan ilmiah tentang logika distribusi politik uang. Operasi politik uang jelas memerlukan biaya tinggi, baik ongkos membangun struktur tim sukses untuk mendistribusikan amplop kepada para pemilih dan tentu saja, suatu keharusan menyediakan uang tunai atau barang yang akan dibagikan. Dengan sumber daya yang terbatas, serta dalam konteks rezim pemilu yang menjamin kerahasiaan pilihan, para caleg menitikberatkan efektivitas politik uang dalam menentukan hasil akhir pemilu. Karena itu, distribusi materiel akan difokuskan pada sebagian segmen pemilih yang dianggap potensial menyumbang suara. Pada saat yang sama, mereka mengesampingkan segmen yang lain.⁴⁷ Kajian kesarjanaan tentang klientelisme berujung pada debat dua mazhab yang berbeda secara diametral, yakni model pemilih inti (*core-voter model*) versus pemilih mengambang (*swing-voter approach*). Mazhab pertama mengandaikan bahwa partai akan membagikan insentif materiel kepada

⁴⁶ Vlaicu, 2016. Dilihat dalam *ibid.*,

⁴⁷ Stokes, SC, T. Dunning, M. Nazareno, dan V. Brusco. 2013. *Brokers, Voters and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics*. New York: Cambridge University Press. Dilihat dalam *ibid.*,

pendukung inti atau loyalis partisan guna memobilisasi mereka agar memberikan suara pada hari pemilu.⁴⁸ Sementara itu, pendekatan kedua melihat politik uang sebagai alat atau strategi untuk memengaruhi pemilih yang masih bimbang.⁴⁹

Walaupun hasil survei-survei yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi dalam buku nya yang berjudul “Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru”, tampaknya memberikan bukti permulaan bagi model pemilih inti dan survei representatif terhadap politisi serta tim sukses juga menemukan banyak bukti keinginan kuat mesin politik menysar loyalis partisan, realitas di lapangan jauh lebih kompleks. Terlepas dari itu bahwa pemilih partisan cenderung menjadi target operasi politik uang, pada kenyataannya, secara total pemilih semacam itu hanya merupakan bagian kecil dari pemilih di Indonesia. Mayoritas pemilih tidak memiliki kedekatan dengan partai mana pun. Bagaimana mungkin politisi bisa menang dengan hanya mengandalkan dukungan para loyalis partai mengingat terbatasnya jumlah pemilih loyal di Indonesia? Ketika pemilu semakin dekat, bagaimana cara politik mendistribusikan amplop begitu mereka kehabisan pasokan loyalis partisan? Masalah ini menjadi semakin rumit karena dalam sistem proporsional terbuka seperti yang digunakan di Indonesia, para kandidat dari satu partai harus bersaing memperebutkan suara demi mendapatkan kursi. Karena itu, loyalis partisan yang jumlahnya terbatas akan sangat direbutkan oleh para caleg yang bekerja ekstra keras mencari *personal votes* (pilihan yang ditujukan langsung ke nama kandidat, bukan sekedar partai).⁵⁰ Dalam buku nya juga menyebutkan bahwa meskipun politik uang rentan salah sasaran dan rawan

⁴⁸ Nichter, SC. 2008. “Vote Buying or Turnout Buying? Machine Politics and the Secret Ballot”. American Political Science Review, 102(1):19-33. Dilihat dalam ibid., hlm. 7.

⁴⁹ Stokes, SC. 2005. “*Perverse Accountability: A Formal Model of Machine Politics with Evidence from Argentina*”. American Political Science Review, 99(3):315-325. Dilihat dalam ibid.,

⁵⁰ Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), hlm. 7.

kebocoran, buku ini menunjukkan bahwa para caleg masih sangat antusias melakukan operasi uang. Ini terbukti dengan fakta bahwa sepertiga pemilih di seluruh Indonesia terpapar politik uang.⁵¹

Burhanuddin dalam bukunya, mengatakan bahwa meskipun secara relatif pemilih partisan cenderung menjadi target pembelian suara, secara absolut, sebagian besar politik yang terjadi di kalangan pemilih mengambang (karena jumlah loyalis partai yang relatif kecil di Indonesia). Terlepas dari banyaknya salah sasaran dan rentan kebocoran, politik uang tetap merupakan strategi yang menarik bagi banyak kandidat, karena efek pembelian suara pada pilihan elektoral sebesar 10 persen itu sudah lebih dari cukup untuk memastikan kemenangan. Terlebih lagi, dinamika elektoral yang sangat kompetitif membuat caleg terperangkap dalam "dilema tahanan" (*prisoner's dilemma*), sehingga menjadikan politik uang muncul sebagai *counter mechanism* tandingan untuk menetralisasi efek pembelian suara yang dilakukan caleg lawan. Selain itu, dibandingkan dengan strategi-strategi lainnya, politik uang secara relatif masih lebih efektif dalam mengumpulkan pundi-pundi suara.⁵²

Singkat kata, terlepas dari masalah "lebih dulu ayam atau telur", studi ini mengkonfirmasi banyak studi sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem pemilu sangat memengaruhi strategi dan perilaku politisi. Ketika suara terbanyak menentukan siapa caleg yang akan memperoleh kursi yang dimenangkan satu partai, maka setiap caleg akan membangun citra personal daripada bergantung pada reputasi partai.⁵³ Dalam konteks sistem proporsional terbuka secara penuh ini, persaingan internal partai lebih menentukan prospek elektoral seorang caleg

⁵¹ Ibid., hlm. 8.

⁵² Ibid., hlm. 51.

⁵³ Ibid., hlm. 286.

ketimbang persaingan antarpantai. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, persaingan antar caleg dalam satu partai inilah yang membuat mereka terlibat dalam adu kampanye personal yang intensif.⁵⁴ Karena kursi diberikan kepada caleg yang memperoleh suara terbanyak dalam satu partai, maka persaingan intrapartai dalam sistem proporsional terbuka meningkatkan tensi ketidakpastian elektoral di tingkat kandidat. Narasi yang dominan di kalangan politisi adalah bahwa hampir semua caleg ragu terhadap peluang keterpilihan mereka tidak hanya caleg yang merupakan kader biasa yang ditempatkan di nomor urut bawah, tetapi kecemasan juga menghinggapi para elite partai yang menempati posisi tinggi daftar nomor urut caleg.⁵⁵ Karena itu, hubungan dengan politik uang sangat jelas. Pertama, ketika berjuang dengan rekan sesama partai, para cam tidak bisa lagi mengandalkan label atau nama partai sebagai senjata pemungkas yang akan membawa mereka terpilih ke parlemen.⁵⁶

Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya, menemukan bahwa politisi masih memiliki insentif terlibat dalam pembelian suara. Sebab bukti menunjukkan bahwa praktik itu tampaknya memengaruhi perilaku pemilih di Indonesia. Survei pemilih yang penulis lakukan tak lama setelah Pemilu Legislatif 2014 memungkinkan untuk memeriksa pengaruh pembelian suara terhadap jumlah partisipasi pemilih dalam pemilu. KPU melaporkan bahwa jumlah partisipasi pemilih nasional dalam Pemilu Legislatif 2014 adalah sekitar 75 persen.⁵⁷

Ketika pemilu semakin dekat, frekuensi jual suara meningkat secara signifikan. Dalam survei nasional yang diadakan pada Januari 2014, hanya 4,3 persen pemilih yang terpapar politik uang. Namun, ketika hari pencoblosan

⁵⁴ Ibid.,

⁵⁵ Ibid.,

⁵⁶ Ibid.,

⁵⁷ Ibid., hlm. 263.

semakin dekat, responden yang mengaku menjadi target operasi politik uang mengalami peningkatan enam kali lipat menjadi sekitar 25 persen. Proporsi pemilih yang menjadi target pembelian suara tidak hanya meningkat secara dramatis, tetapi insiden pemberian atau amplop ganda (*multiple payment*) juga meningkat. Dengan menggunakan data survei yang ekstensif, studi ini menemukan pola yang konsisten, yakni semakin dekat dengan hari pemungutan suara, semakin besar potensi pemilih menerima insentif elektoral lebih dari satu partai. Menjelang Pemilu Legislatif 2014, Burhanuddin Muhtadi mengadakan survei nasional setiap bulan menggunakan metodologi dan pertanyaan yang sama dengan survei pasca pemilu mengenai kemungkinan para responden terpapar pembelian suara atau tidak.⁵⁸

Jika dibandingkan dengan survei pra-pemilu yang dilakukan pada Maret 2014, kurang lebih setengah dari periode kampanye, insiden jual beli suara meningkat secara tajam dari 10,7 persen ke 25-33 persen (bergantung pada pengukuran yang dipakai). Hal ini membuktikan bahwa politik uang lebih banyak difokuskan pada hari-hari atau jam-jam sebelum hari dilaksanakannya pemilu atau bahkan pada hari pemilu itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini dikenal sebagai serangan fajar, sebuah istilah yang mencerminkan fakta bahwa keuntungan materiel (terutama uang tunai) sebagai kompensasi suara-dibagikan tepat setelah salat Subuh pada hari pemungutan suara. Banyak calon dan tim sukses yang percaya bahwa makin dekat amplop didistribusikan di hari pemungutan suara, makin efektif politik uang dalam mempengaruhi pilihan elektoral.⁵⁹

⁵⁸ Ibid., hlm. 288.

⁵⁹ Ibid., hlm. 65-66.

Dalam usaha menampilkan gambar lengkap politik uang di Indonesia, responden yang mengaku terpapar juga diminta menyebutkan nama partai atau partai si calon yang terlibat dalam transaksi jual beli suara dalam Pemilu 2014.

Responden dipersilakan menyebut lebih dari satu partai, karena mungkin saja mereka didekati oleh banyak calon dari partai-partai yang berbeda. Temuan menunjukkan bahwa responden yang mengaku disasar operator politik uang menyebut semua partai terlibat praktik haram tersebut, tentu dengan kadar keterlibatan yang beragam. Meskipun politik uang juga biasa dilakukan calon yang melalui partai-partai Islam, empat pembeli suara terbesar datang dari partai nonagamais: Di antara pemilih yang mengaku ditawari uang atau hadiah, 32,2 persen mengaku diiming-imingi imbalan calon dan Partai Golkar, lalu disusul PDI Perjuangan (26,5 persen), Gerindra (25,4 persen), dan Partai Demokrat (18,4 persen). Bentuk suap yang paling sering diberikan kepada pemilih adalah uang (75,5 persen), sembako beras, gula dan mi (12,8 persen), dan perangkat keras rumah tangga (11,4 persen).⁶⁰

Selain itu, pengukuran politik uang di tingkat individu dan warga juga menemukan hasil yang konsisten dalam hal pelaku dan barang yang ditransaksikan. Di antara responden yang mengaku bahwa daerah mereka menjadi target, Golkar kembali menduduki urutan teratas dalam daftar pembeli suara yang paling sering disebutkan (35,5 persen), diikuti oleh PDI Perjuangan (30,6 persen) Gerindra (26,8 persen), dan Partai Demokrat (20,6 persen). Daftar peringkat ini mengulangi urutan dalam pengukuran uang secara individual.

Demikian pula sebagaimana temuan di kalangan responden yang mengaku langsung ditarget pembelian suara, semua partai terlibat dalam operasi jual beli

⁶⁰ Ibid., hlm. 66.

suara menurut pengukuran politik uang tingkat warga. Uang, sembako, dan perkakas rumah tangga juga menjadi barang yang paling sering didistribusikan sebagai imbalan suara. Menurut responden yang mengaku lingkungan tempat tinggal mereka menjadi sasaran empuk politik uang 78,9 persen di antaranya diberi uang tunai, sembako (12,8 persen), peralatan rumah tangga (11,4 persen), dan barang-barang lainnya (14,8 persen). Jangan lupa bahwa responden diperbolehkan menjawab lebih dari satu.⁶¹

Sebagai bahan perbandingan dengan tingkat politik uang di pemilu sebelumnya, survei nasional pada 2014 juga menanyakan pertanyaan tentang politik uang di Pemilu Legislatif 2019 menggunakan *wording* yang sama dengan pengukuran politik uang secara individual dan warga. Hasilnya mengonfirmasi temuan penulis sebelumnya (berdasarkan survei nasional 2009 dan 2013) bahwa insiden jual beli suara semakin masif terjadi di Pemilu 2014. Pada Pemilu 2019, responden yang mengaku secara individu menjadi target operasi politik uang hanya 10,1 persen. Dalam hal latar belakang partai pembeli suara, pasar suara juga didominasi oleh partai-partai non-Islam seperti Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat. Barang-barang yang paling lazim didistribusikan pada 2009 juga dalam bentuk uang tunai, sembako, dan peralatan rumah tangga. Politik uang di tingkat warga pada 2009 juga sedikit lebih tinggi (12,9 persen) dibandingkan dengan politik uang di tingkat individu (10,1 persen). Namun demikian, perbedaan di antara dua pengukuran ini lagi-lagi juga tidak signifikan secara statistik.⁶²

⁶¹ Ibid., hlm. 68.

⁶² Ibid..

5.2 Vote Buying pada Contoh Kasus di Pemilu 2019 di Indonesia

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerbitkan hasil patroli selama masa tenang kampanye jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2019. Dalam patroli tersebut, Bawaslu masih menemui sejumlah pelanggaran. Dalam patroli tersebut, Bawaslu masih menemui sejumlah pelanggaran. Sebanyak 25 pelanggaran berupa *money politics* atau politik uang ditemukan Bawaslu di 25 Kabupaten/Kota.⁶³

Berikut ini rincian pelanggaran selama masa tenang di 25 Kabupaten bersama dengan barang bukti yang ditemukan:⁶⁴

1. Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Terdapat 8 karung beras dan minyak goreng disertai kartu nama yang ditiptikan oleh calon di salah satu rumah warga. Akan tetapi sebelum dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar, terlebih dahulu dipergoki oleh Penwascam dan Pengawas TPS.
2. Desa Pulau Nalen, Kecamatan Pesangan Kab Biren, Provinsi Aceh
Terdapat bagi-bagi uang sebesar Rp 100.000 yang dibagikan kepada setiap pemilih. Lantas pengawas pemilu telah menyita barang bukti
3. Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu
Pada tanggal 13 April 2019 terdapat suatu kejadian dan temuan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000 yang dibagikan kepada masyarakat dengan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 50.000 per orang untuk memilih calon anggota DPRD.

⁶³ Tribunnews.com, "Bawaslu Tangkap 25 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu 2019, Mulai Sogokan Sembako hingga Uang Tunai", <https://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/04/16/bawaslu-tangkap-25-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-2019-mulai-sogokan-sembako-hingga-uang-tunai?page=all> diakses pada 20 September 2020.

⁶⁴ Ibid..

4. Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara

Pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIB terdapat peristiwa dimana ibu-ibu mendatangi lokasi yang sudah ditentukan dengan membawa kartu keluarga untuk didata yang kemudian akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000 dan kartu nama caleg.

5. Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara

Pada tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 16.00 WIB terdapat peristiwa pelaku yang membawa uang senilai Rp 11.700.000 untuk dibagi-bagikan.

Akan tetapi dua pelaku ini sudah diamankan oleh pihak Bawaslu serta Polres setempat.

6. Siborang, Kota Padangsidimpuang, Provinsi Sumatera Utara

Pada tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 17.30 WIB terdapat peristiwa dugaan politik uang di masa tenang Dari hasil interogasi diketahui bahwa amplop yang berisikan uang tersebut di dapat dari calon bahwa amplop tersebut akan di berikan kepada orang-orang di desa agar memilih pada saat pemilihan. Di dapati membawa amplop sebanyak 20 untuk dibagikan kepada pemilih.

7. Kecamatan Bilah Hulu, Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara

Pada tanggal 13 April 2019 terdapat peristiwa seseorang mengajak warga supaya memilih saudara calon dengan sekaligus memberikan uang sebanyak Rp 400.000.

8. Kecamatan Padang Bolak, Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara

Pada tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 02.00 WIB terdapat peristiwa seorang pelaku membawa 82 amplop yang berisi uang dan kartu caleg.

Polisi dengan sigap menggrebek pelaku dan mengamankan barang bukti.

9. Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat

Pada tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 18.30 WIB terdapat peristiwa seseorang memberikan uang Rp 150.000 di depan Kantor KUA Tanjung Harapan, Kota Solok.

10. Kecamatan Sindang Kasih, Ciamis, Provinsi Jawa Barat

Pada tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 22.30 WIB terdapat peristiwa pembagian amplop berwarna putih berisi uang masing-masing sebesar Rp 25.000 yaitu 1 lembar pecahan Rp 20.000 dan 1 Lembar Rp 5.000.

11. Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Pada tanggal 14 April 2019 terdapat kegiatan rutin yaitu senam yang diikuti oleh warga setempat. Akan tetapi ada ibu-ibu yang mengajak warga untuk mampir ke rumahnya untuk diberikan bingkisan berupa detergen disertai dengan contoh surat suara yang menunjukkan cara memilih calon.

12. Kecamatan Lelea, Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Di saat melakukan patroli masa tenang pengawas pemilu mendapati orang-orang yang sedang membungkus sembako dengan disertai specimen surat suara DPR RI atas nama P dan sebagian sudah dibagikan ke masyarakat.

13. Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, Provinsi Jawa Tengah

Pada tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 21.48 WIB terdapat peristiwa politik uang. Dimana Bawaslu Banyumas menerima laporan dari warga melalui SMS. Kemudian di alamat tersebut terdapat sejumlah 4 orang sedang berada di teras rumah. Dilakukan pendekatan dan penggalian informasi hingga seseorang mengakui telah menerima kartu nama calon serta diberi uang pecahan Rp 100 ribu (Rp 50 ribu untuk dia dan Rp 50 ribu untuk istrinya).

14. Kecamatan Karanggeneng, Boyolali, Provinsi Jawa Tengah

Pada tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 16.00 WIB terdapat peristiwa pemilih didatangi oleh seseorang, kemudian orang tersebut memberikan amplop berisi uang kertas Rp 100.00 dengan No Seri OL5420958, Kartu saku bergambar calon, setelah memberikan amplop diminta untuk pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih sesuai tulisan yang ada di Amplop.

Setelah itu seseorang tersebut meninggalkan rumah kami. kemudian kasus ini dilaporkan ke Bawaslu.

15. Kecamatan Mejobo, Kudus, Provinsi Jawa Tengah

Pada tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 21.00-23.30 WIB terdapat peristiwa sekelompok warga berjalan menggunakan tas dan yang bersangkutan membawa stiker/foto caleg serta berperilaku yg mencurigakan. Kemudian tim melakukan penangkapan dan penggledahan serta menginvestigasi terkait bahan/stiker bergambar calon dan beberapa uang lembaran yang mereka bawa, sehingga yang bersangkutan (khusus yg membawa uang pecahan RP 100.000,-) dibawa ke kantor Bawaslu untuk investigasi lanjutan, dari investigasi lanjutan tersebut bahwa uang yang dibagikan ke warga supaya besok pada saat pemilihan mencoblos.

16. Kecamatan Gebang, Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Adanya peristiwa bagi-bagi uang dari istri Caleg. Dimana didapatkan uang yang belum dibagikan sejumlah 3.750.000 di tangan pembagi dan yang sudah diberi uang ada yang kabur lewat pintu belakang. Istri Caleg yang membagikan uang ke kordes-kordes tersebut adalah PNS di wilayah Kab. Purworejo.

17. Pandarejo, Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur

Terjadi pemberian uang tunai sebesar 50.000 rupiah kepada sekumpulan ibu-ibu rumah tangga dalam kompleks. Di duga pemberi uang adalah Ibu dari salah satu caleg DPRD Kab/Kota. Sebagaimana keterangan adalah uang sodaqoh.

18. Kec. Selong, Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pengawas pemilu melakukan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap dugaan praktik pemberian uang kepada 14 orang pemilih dengan bukti uang sebesar Rp 25.000 kepada masing-masing pemilih. Praktik pemberian uang dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat.

19. Kec. Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

Pukul 00.26 WITA terjadi kasus pembagian uang kewarga. Kejadian diketahui oleh Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan OTT terhadap pelaku. Pelaku menyatakan bahwa dia hanya diminta untuk membagikan kepada warga oleh seseorang. Dari keterangan pelaku amplop yang dibagi berjumlah 22 amplop. Kasus masih dalam proses investigasi.

20. Kec. Salam Babaris, Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan

KPPS membagikan C6 beserta kartu nama caleg tersebut dan uang 100 ribu.

21. Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan

Pada Sabtu (13/4/2019) Pukul 09.30 WITA, Ibu Indah diduga memberikan uang sebesar Rp.200.000 kepada ibu Maya dengan menyertakan Surat Suara Calon.

22. Kec. Sigi Biromaru dan Dolo, Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah

Dari beberapa Calon anggota DPR RI dan DPRD tersebut diduga melakukan politik uang dalam bentuk materi lainnya yaitu pembagian sembako dan jilbab disertai dengan bahan kampanye pada Minggu (14/4/2019).

23. Kec. Suwawa, Bone Bolango, Provinsi Gorontalo

Kejadian terjadi pada Minggu (14/4/2019), pengawas pemilu menindaklanjuti informasi masyarakat terhadap dugaan praktik politik uang kepada pemilih sebesar Rp 700.000. Di tempat lain pengawas pemilu juga menemukan praktik politik uang lainnya dengan total Rp 1.400.000 yang diberikan kepada beberapa orang pemilih, ada yang mendapatkan Rp200.000, Rp100.000, Rp400.000. Terdapat satu pemilih yang juga dimintai tanda bukti dengan membubuhi tanda tangan dengan materai.

24. Kota Jayapura, Provinsi Papua

Pada Senin (15/4/2019) Pukul 17.00 WIT, di Hotel Horison lantai 6 kamar 603, Sentra Gakkumdu diamankan seorang Pelaku dengan Barang bukti uang Rp 100 juta dan kartu kemenangan atas nama pelaku. Diketahui, patroli tersebut dilakukan oleh Bawaslu berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017. Adapun, sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut diatur dalam pasal 523 ayat 2. Yakni setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Vote buying uang merupakan sebuah hal yang melanggar hukum dan juga ilegal. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri jika hal tersebut sudah seperti menjadi budaya ketika adanya pemilihan umum. Masyarakat yang kurang paham mengenai ilegalnya politik uang akan tetap menerima berbagai macam *vote buying*, termasuk menerima pemberian uang dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab demi memenangkan sebuah pemilu.

Masyarakat dengan pemahaman materialis akan dengan mudah menerima politik uang dengan berbagai bentuk karena dianggap menguntungkan mereka. Apalagi dengan bentuk uang atau sembako. Sehingga masyarakat yang seperti ini mudah dimanfaatkan oleh elit-elit politik untuk menjadi sasaran pemberian politik uang.

Sedangkan berkaitan dengan *vote buying* yang terjadi selama pemilihan umum 2019 diantaranya adalah pemberian uang dengan bermacam-macam nominal, sembako, pemberian bahan material untuk perbaikan jalan di kampung atau perbaikan masjid di desa-desa, serta memberi perlengkapan sholat untuk masjid-masjid, dan yang paling baru adalah pemberian asuransi kecelakaan atau kesehatan kepada masyarakat.

Sehingga model *vote buying* yang ada pada pemilihan umum 2019 di Indonesia sama seperti sebelumnya. Yaitu banyaknya pemberian bahan material untuk perbaikan jalan di kampung atau perbaikan masjid di desa-desa, serta memberi perlengkapan sholat untuk masjid-masjid..

6.2 Saran

- Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu dikembangkan lagi dan bisa secara langsung terjun ke lapangan untuk menerima informasi lebih detail lagi di setiap desa atau kota.
- Dengan adanya pengembangan dari penelitian ini dengan terjun secara langsung ke lokasi, diharapkan peneliti selanjutnya mampu menemukan *vote buying* terbaru yang ada di setiap desa atau kota di Indonesia.
- Diharapkan pemerintah lebih serius lagi dalam menangani pencegahan terhadap adanya praktik-praktik politik uang menjelang atau saat berlangsungnya sebuah pemilihan umum. Sehingga bisa meminimalisir terjadinya politik uang di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

Afrimadona, Amir Nashirudin; Anis Hidayah, dkk, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 "Perihal Pemungutan dan Perhitungan Suara"* (Jakarta: Bawaslu, 2019)

Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta : Salemba Empat, 2016)

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2009)

Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021).

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Prof. Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber Teori-Teori, Instrumen dan Metode* (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit, 2008)

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat (Analisis tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden Indonesia pasca Orde-Baru)* (Jakarta: Mizan)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007)

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)

Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra* (Yogyakarta: tim redaksi CAPS, 2011)

Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung, PT Mizan Publika, 2015)

V.Wiratna Sujarweni, *Metodeologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014)

Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Tarsita, 1990)

Jurnal

Hatta Abdi Muhammad, Ahmad Baidawi, "Rekayasa Desain Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia yang Efektif, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 4 No 3 Juli 2020

Muhtadi, B., Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), 55-74 (2019)

Nurdin, A., Jual Beli Suara dan Perilaku Pemilih Di Pemilu Lokal Indonesia, *Jurnal Ilmu Politik dan Administrasi* (2014)

Sholikin, A., Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, Vol. 5, Nomor 1 (2019)

Agus, D., Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal Moderat*, Vol. 5, Nomor 3, 213-226 (2019)

Situs Online

Admin KPU, 2019, 'Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia' <https://www.kpu.go.id/index.php/post/read/RPnEDbmsgbiGX7_KWUrHhrrpuo9ACvgbcFjXOXGJj4W3xAlG14QgWoY-k_AQ-YFQHSx3Sbbu_v8M_gfh9Yr0sw~/oH8cBF2FWsUAjMKxroMJdJGzImyLXcXC222iB3EidFwEPfrISIq7FgX2bfBf49WAI9O7ghYnRnvtxqSkobZw~~~>

Badan Pusat Statistik (BPS), "Sensus Penduduk 2010" <<https://sp2010.bps.go.id/>>

Detiknews.com, "Berapa Jumlah Penduduk Indonesia 2020? Naik atau Turun?" <<https://news.detik.com/berita/d-4975893/berapa-jumlah-penduduk-indonesia2020-naik-atau-turun>>

Hariyanto, 'Implikasi Politik Uang Terhadap Perilaku Pemilih' <<https://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/article/detail/89>>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <<https://kbbi.web.id/rasional>>

Tribunnews.com, "Bawaslu Tangkap 25 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu 2019, Mulai Sogokan Sembako hingga Uang Tunai", <<https://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/04/16/bawaslu-tangkap-25->>

[kasus-politik-uang-jelang-pemilu-2019-mulai-sogokan-semako-hingga-uang-tunai?page=all>](#)

VoaIndonesia.com, “PPATK Temukan Modus Baru Politik Uang dalam Pemilu 2019”, <<https://www.voaindonesia.com/a/ppatk-temukan-modus-baru-politik-uang-dalam-pemilu-2019/4863564.html>>

Skripsi

Ida Farida, Skripsi: “Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Materi Karakteristik Geografis Indonesia Melalui Model Pembelajaran Course Review Hooray Dengan Media Pop Up Book Pada Siswa Kelas V MI Nurul Hikmah Kedungringin 02 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2019/2020” (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019), hlm.33.

